



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029

**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN
2025**

KATA PENGANTAR

Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Diharapkan dengan ditetapkannya Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tahun 2025-2029 ini, dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan lingkup Satuan Kerja Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.

Belawan , 30 Januari 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Belawan,



Mansur

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A	Latar Belakang	1
B	Kondisi Umum	2
C	Potensi dan Permasalahan	8
D	Lingkungan Strategis	10

BAB 2 VISI, MISI, DAN TUJUAN

A	Pembangunan Nasional	13
B	Pembangunan Kelautan dan Perikanan	16
C	Pembangunan Perikanan Tangkap di PPS Belawan	17

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional	19
B	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan	20
C	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap	24
D	Kerangka Regulasi	37

BAB 4 INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A	Target Kinerja	40
B	Kerangka Pendanaan	44

BAB 5 PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kerangka Regulasi

Lampiran 2: Kerangka Pendanaan

BAB

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai salah satu negara maritim terbesar dunia, memiliki potensi kelautan dan perikanan yang melimpah. Hal tersebut merupakan modal dasar yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju, berdaulat, adil dan makmur serta sebagai sebuah bangsa yang tangguh dalam hal politik, keamanan sosial, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Kegiatan pembangunan subsektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", serta mendukung pencapaian delapan Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dengan fokus pada misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.

Pencapaian Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah keniscayaan apabila menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai episentrum pembangunan nasional, mengingat potensi sumber daya perairan yang sangat besar. Orientasi pembangunan sudah semestinya beralih ke sektor kelautan dan perikanan dengan menjadikan sektor ini sebagai poros penggerak pembangunan dan perekonomian nasional, transformasi pendekatan pembangunan yang sebelumnya hanya berorientasi pada peningkatan produksi menjadi pendekatan pembangunan secara terukur dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta berorientasi pada permintaan pasar yang menempatkan ekologi sebagai panglima. Transformasi pendekatan diimplementasikan ke dalam lima arah kebijakan pembangunan Ekonomi Biru yaitu:

- 1) Memperluas kawasan konservasi laut;
- 2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
- 3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
- 4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- 5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Salah satu program prioritas KKP yang dimandatkan pada Ditjen Perikanan Tangkap adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menjaga ekosistem perairan dan juga dalam hal peningkatan ekonomi di sektor kelautan dengan cara memaksimalkan potensi perikanan nasional dan terus meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya perikanan. PIT memastikan aktivitas penangkapan ikan tidak melebihi maksimum potensi lestari (*Maximum Sustainable Yield*) yang diukur berdasarkan status penangkapan per wilayah. Diharapkan dengan adanya PIT maka sumber daya ikan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Berbagai akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, pendapatan, serta tingkat konsumsi ikan, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

B. Kondisi Umum

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memulai proses transformasi pembangunan kelautan dan perikanan sejak periode tahun 2020-2024 melalui arah kebijakan pembangunan Ekonomi Biru. Periode transisi rencana pembangunan jangka menengah dari periode 2020-2024 ke periode 2025-2029 merupakan dokumen yang digunakan untuk merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya, termasuk capaian keberhasilan dan kegagalan dalam mengimplementasikan program. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi program/kegiatan yang memerlukan perbaikan dan inovasi pada kebijakan mendatang. Capaian pembangunan perikanan tangkap direfleksikan melalui capaian kinerja antara lain sebagai berikut:

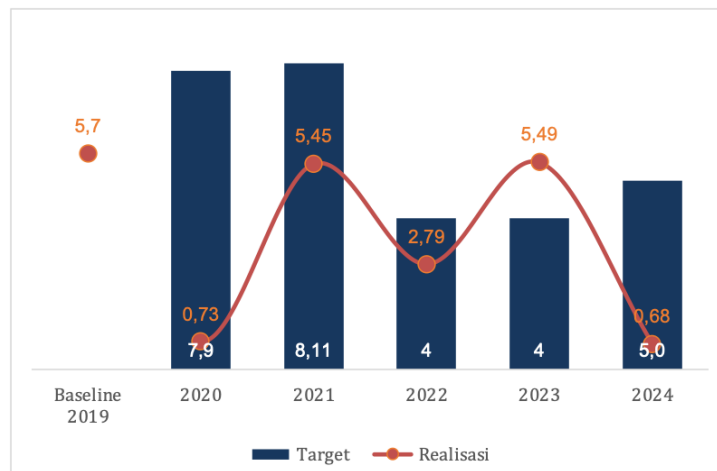
1. Pertumbuhan PDB Perikanan

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Pada tahun 2020, realisasi produksi perikanan berada pada titik terendah yang hanya tercapai sebesar 0,73%, sangat jauh dari target yang telah ditetapkan sebesar 7,9%. Realisasi yang rendah tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 sebagaimana dilaporkan oleh BPS (2021) dan FAO (2021). Pembatasan mobilitas, pembekuan ekspor, serta minimnya kegiatan di pelabuhan turut memperburuk kinerja produksi perikanan. Produksi

membaik pada tahun 2021 dengan realisasi pertumbuhan PDB sebesar 5,45%, meskipun target tahunan berada pada angka 8,11%. Hal tersebut disebabkan oleh ekonomi yang semakin pulih serta intervensi pemerintah berupa stimulus yang tepat sasaran telah merangsang ekonomi pulih (KKP, 2022; World Bank, 2022). Namun, pada tahun 2022, realisasi pertumbuhan PDB kembali turun ke level 2,79%, dari target sebesar 4%. Penurunan ini diakibatkan oleh kondisi cuaca ekstrem yang berdampak pada menurunnya hasil tangkapan dan distribusi ikan di wilayah pesisir BPS (2023).

Tahun 2023 menjadi titik balik dengan pertumbuhan yang kembali menguat ke angka 5,49%, melebihi target yang dipatok sebesar 4%. Memasuki tahun 2024, pertumbuhan PDB perikanan baru mencapai 0,68%, jauh di bawah target sebesar 5,0%. Beberapa faktor penyebabnya adalah cuaca ekstrem, banjir di sentra-sentra produksi seperti Sumatera Utara, Jambi, dan wilayah Pantura (KKP, 2024; BMKG, 2024).



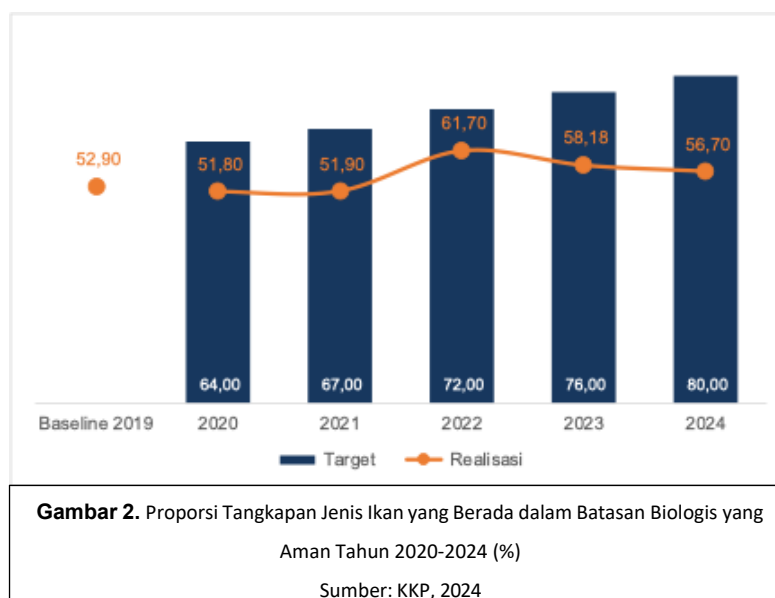
Gambar 1. Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2019-2024 (%) Sumber: BPS, 2024

2. Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Dalam rangka mendukung target pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), yang diukur melalui capaian indikator proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman. Indikator ini mengukur sejauh mana kebijakan perikanan tangkap dalam melakukan pengelolaan perikanan di suatu WPPNRI atau jenis ikan tertentu melalui kegiatan kapal perikanan yang menerapkan *logbook* penangkapan ikan, kapal perikanan yang dipantau oleh *observer* dan penghitungan alokasi sumber daya ikan dengan 2 kegiatan utama yaitu, *Logbook* Penangkapan Ikan (LBPI) dan pemantau kapal penangkap ikan serta kapal pengangkut ikan (*Observer*).

Dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan, perlu adanya pengendalian penangkapan ikan melalui penerapan kuota usaha penangkapan ikan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) serta evaluasi terhadap pengelolaan perikanan yang sudah dilaksanakan. Indikator pengendalian dihitung berdasarkan rasio antara volume produksi tangkapan laut pada satu tahun berjalan (tidak termasuk tuna, cakalang, dan kekerangan) dengan estimasi potensi sumber daya ikan sebagaimana tercantum dalam regulasi tersebut.

Selama kurun waktu 2020-2024, pemerintah dapat menjaga proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman meskipun terjadi peningkatan persentase proporsi tangkapan pada tahun 2022 dan 2023, namun realisasi tersebut masih dibawah angka batasan proporsi tangkapan yang aman yaitu kurang dari sama dengan 80%.



Keberhasilan pencapaian proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%) didukung dengan pelaksanaan kegiatan diantaranya: 1) Kegiatan pendataan berbasis daerah penangkapan melalui pelaporan LBPI yang dirancang secara akurat pada setiap *trip* di WPPNRI guna memberikan gambaran tingkat eksploitasi potensi perikanan dan ketersediaan data penangkapan ikan di WPPNRI; 2) Pengumpulan data dan verifikasi data LBPI dilakukan dengan menggunakan elektronik LBPI yang dirangkum dalam aplikasi SILOPI (Sistem Informasi *Logbook* Penangkapan Ikan); 3) Penempatan tenaga *observer* di kapal perikanan untuk menjamin ketersediaan data sebagai data pembanding. LBPI juga menjadi sarana validasi data yang memberikan informasi data biologis ikan.

3. Volume Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan dihitung berdasarkan total volume hasil perikanan tangkap yang tercatat dari seluruh kabupaten/kota. Produksi perikanan tangkap meliputi perairan umum dan daratan.

Perikanan tangkap di Indonesia memiliki peran yang penting terhadap produksi perikanan tangkap dunia. Hal tersebut tercantum pada laporan FAO (2022), yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kontributor kedua terbesar setelah China dengan produksi hasil tangkapan sebesar 7% terhadap total tangkapan dunia, dan 8,2% dari total tangkapan laut. Capaian kinerja Subsektor Perikanan Tangkap menunjukkan kinerja yang melampaui target dengan realisasi sebesar 7,39 juta ton dari target 6 juta ton atau mencapai 123,21%.

Perikanan tangkap di Indonesia memiliki peran yang penting terhadap produksi perikanan tangkap dunia. Hal tersebut tercantum pada laporan FAO (2022), yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kontributor kedua terbesar setelah China dengan produksi hasil tangkapan sebesar 7% terhadap total tangkapan dunia, dan 8,2% dari total tangkapan laut. Capaian kinerja Subsektor Perikanan Tangkap menunjukkan kinerja yang

melampaui target dengan realisasi sebesar 7,39 juta ton dari target 6 juta ton atau mencapai 123,21%.

Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024*
Perikanan Tangkap	6.989.090	7.224.501	7.489.395	8.178.309	7.392.838
Perikanan Tangkap-Laut	6.494.140	6.767.565	7.026.426	7.706.223	6.924.277
Udang	206.765	247.502	250.981	274.384	280.698
Tuna	300.803	359.132	355.351	355.966	339.193
Cakalang	468.269	432.845	474.810	458.899	521.403
Tongkol	581.074	593.906	660.476	761.340	642.356
Lainnya	4.937.229	5.134.180	5.284.808	5.855.634	5.140.626
Perikanan Tangkap-Umum	494.950	456.936	462.970	472.086	468.561
Udang	18.900	17.180	17.321	14.535	19.299
Ikan	476.050	435.758	441.534	452.072	444.793
Lainnya		3.998	4.115	5.479	4.470

Tabel 1. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 (Ton)

*capaian s.d Triwulan IV 2024 Sumber: KKP, 2024

Pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap Tahun 2020- 2024 sebesar 3,02% dengan perincian pertumbuhan perikanan tangkap sebesar 1,51% dimana perikanan tangkap laut tumbuh sebesar 1,72% dan perairan darat tumbuh melambat sebesar 1,28%. Produksi perikanan tangkap Tahun 2024 mengalami penurunan dari Tahun 2023 disebabkan kondisi cuaca ekstrem seperti badai, gelombang tinggi yang mengganggu aktivitas penangkapan ikan, merusak kapal dan mengurangi hasil tangkapan.

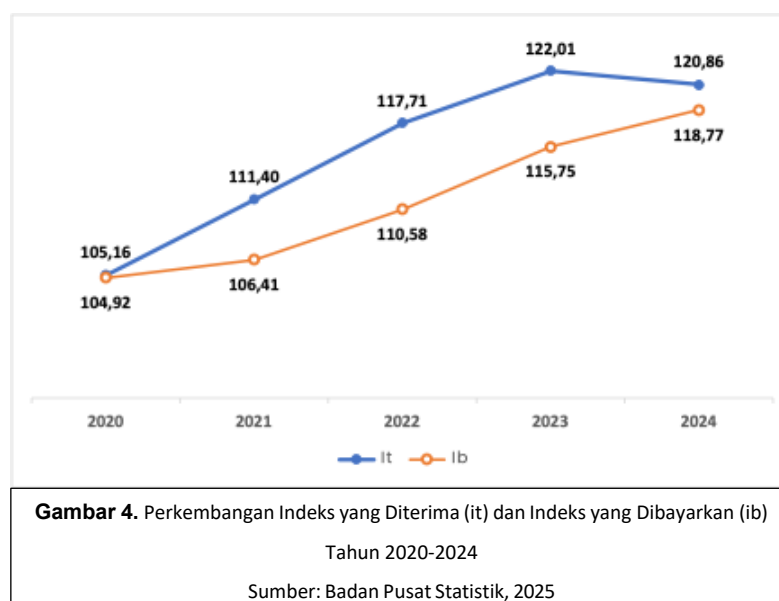
Beberapa upaya pemerintah dalam pengelolaan perikanan adalah dengan menetapkan program prioritas terutama berkaitan dengan pengelolaan laut untuk mendukung aktivitas produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan yaitu program penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pembangunan.

4. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan adalah indikator yang mengukur kemampuan daya beli nelayan sebagai salah satu pelaku utama di subsektor perikanan tangkap. NTN diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima nelayan (It) dengan harga yang dibayarkan nelayan (Ib). Perhitungan NTN dilakukan dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.



Realisasi NTN selama 5 tahun terakhir (2020-2024) menunjukkan tren yang fluktuatif meskipun target tahunan yang ditetapkan selalu meningkat. Capaian indikator kinerja NTN selama tahun 2020-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 0,42% dengan nilai NTN yang mengalami kenaikan dari 100,22 di tahun 2020 menjadi 101,76 di tahun 2024. Puncak pencapaian NTN tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi capaian sebesar 106,45 dimana angka tersebut berada di atas target sebesar 106,00 dan menjadi tahun dengan NTN tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kenaikan tersebut disebabkan oleh jumlah tangkapan yang meningkat, harga pasar yang tinggi, serta adanya subsidi BBM yang diberlakukan oleh pemerintah sehingga menekan biaya produksi nelayan. Pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan realisasi yang tajam meskipun dengan angka yang masih berada di atas 100. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya surplus atau peningkatan kesejahteraan nelayan meskipun angka tersebut belum optimal sebab peningkatan yang tidak signifikan dan tidak mencapai target akhir yang ditetapkan.



Adapun penurunan tajam di tahun 2024 menunjukkan adanya tantangan besar yang dihadapi sektor perikanan, baik dari sisi produksi maupun daya beli nelayan. Jika ditinjau dari grafik perkembangan indeksnya, penurunan indeks yang diterima (It) dan peningkatan indeks yang dibayarkan (Ib) dengan selisih yang mengecil di tahun 2024 menandakan terjadi penurunan daya beli atau margin keuntungan nelayan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait keberlanjutan kesejahteraan nelayan di masa depan, terutama jika tren kenaikan biaya produksi terus berlanjut tanpa diimbangi peningkatan harga jual hasil tangkapan atau efisiensi usaha perikanan. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target NTN diantaranya:

1. Stagnasi pada Sisi Penerimaan Nelayan (Indeks Harga Diterima - It)

Meskipun harga ikan di tingkat konsumen naik, harga yang diterima oleh nelayan di hulu seringkali tidak meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh rantai pasok yang panjang dan tidak efisien. Ikan hasil tangkapan nelayan harus melewati beberapa lapisan perantara (tengkulak, bakul, pelelang, pedagang besar) sebelum sampai ke konsumen akhir. Setiap lapisan mengambil margin keuntungan, sehingga harga di tingkat nelayan tetap rendah. Nelayan seringkali tidak memiliki kekuatan tawar (*bargaining power*) yang cukup dalam struktur pasar ini.

Selain itu, ketika terjadi panen raya pada jenis ikan tertentu, harga di tingkat nelayan justru anjlok karena pasokan melimpah yang tidak diimbangi oleh kapasitas penyerapan pasar dan fasilitas penyimpanan (*cold storage*) yang memadai. Keterbatasan akses nelayan terhadap es dan fasilitas rantai dingin (*cold chain*) di atas kapal dan di pelabuhan pendaratan ikan menyebabkan kualitas ikan cepat menurun. Ikan dengan kualitas lebih rendah akan dihargai lebih murah sehingga turut mempengaruhi indeks harga yang diterima oleh nelayan.

2. Eskalasi pada Sisi Pengeluaran Nelayan (Indeks Harga Dibayar - Ib)

Indeks Harga Dibayar adalah faktor yang paling menekan NTN. Kenaikan biaya yang harus ditanggung nelayan jauh lebih cepat daripada kenaikan pendapatan mereka. Komponen utamanya adalah:

a. Biaya Produksi (Melaut) yang Sangat Tinggi

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komponen biaya terbesar dalam operasional penangkapan ikan, bisa mencapai 40- 60% dari total biaya. Kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, secara langsung melambungkan biaya operasional. Selain itu, kelangkaan atau kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi seringkali memaksa nelayan membeli BBM non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal. Selain BBM yang terus melonjak, harga perlengkapan melaut seperti jaring, mesin kapal, suku cadang, dan es balok juga terus mengalami kenaikan

b. Inflasi Kebutuhan Rumah Tangga

Kenaikan harga kebutuhan pokok secara umum (inflasi), seperti beras, minyak goreng, telur, biaya pendidikan, dan kesehatan, secara signifikan meningkatkan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) oleh nelayan yang juga membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini membuat surplus pendapatan yang mungkin didapat dari hasil melaut menjadi tergerus untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

C. Potensi dan Permasalahan

Potensi pengembangan perikanan tangkap di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem perikanan tangkap secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa potensi utama yakni sebagai berikut:

1. Sumber Daya Perikanan yang Melimpah

Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya perikanan yang sangat melimpah, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kontribusi signifikan terhadap produksi perikanan dunia. Potensi ini tercermin dalam volume produksi perikanan nasional di tingkat global. Berdasarkan data FAO (2024), Indonesia menempati peringkat kedua sebagai produsen perikanan dunia setelah Tiongkok, dengan volume produksi ikan dan rumput laut di tahun 2022 mencapai 22,2 juta ton, berkontribusi sekitar 10% dari total produksi perikanan dunia sebesar 221,9 juta ton.

Di sektor perikanan tangkap, Indonesia juga menempati posisi kedua setelah Tiongkok, dengan volume produksi mencapai 7,5 juta ton atau 8,2% dari total produksi perikanan tangkap dunia pada tahun 2022. Capaian tersebut masih dapat ditingkatkan mengingat potensi yang dimiliki. Berdasarkan hasil kajian, Indonesia memiliki stok sumber daya ikan lestari mencapai 12,01 juta ton per tahun, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Tuna, Tongkol, Cakalang, Udang, Cumi-Cumi, Sotong, dan Gurita menjadi komoditas unggulan Indonesia yang sangat dibutuhkan bagi industri pengolahan sebagai komoditas ekspor. Tidak hanya itu, komoditas lainnya seperti ikan pelagis seperti Layang, Kembung, Lemuru, Kakap Selar, dan Teri merupakan penopang utama konsumsi domestik dan industri pengolahan ikan dalam negeri. Selain potensi sumber daya ikan di perairan laut, terdapat potensi perairan darat. Sejauh ini, perikanan tangkap untuk perairan darat di Indonesia sudah berperan sebagai sumber mata pencaharian (livelihood). Selanjutnya, dari produksi perikanannya, maka perairan darat juga memiliki peran dalam menjaga kelangsungan suplai protein hewani bagi masyarakat lokal (food security) dan bahan baku industri kecil pengolahan hasil perikan. Berdasarkan *Article 7 FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries* dijelaskan bahwa pengelolaan perikanan di perairan darat terdiri dari tiga komponen, meliputi : 1) pengelolaan kegiatan perikanan yaitu upaya yang terkait dengan pengaturan kegiatan penangkapan serta aspek sosial ekonominya seperti perizinan, pengaturan alat tangkap, pengaturan musim, dll. Kebijakan pengelolaan yang diambil umumnya bertujuan untuk membatasi akses penangkapan untuk menghindari upaya penangkapan yang berlebih serta membatasi penggunaan alat tangkap yang merusak; 2) pengelolaan stok ikan mengendalikan ukuran populasi ikan diantaranya melalui penebaran, introduksi spesies baru atau langkah pengkayaan lain yang dianggap tepat; serta 3) pengelolaan lingkungan perairan yaitu menjaga kesesuaian habitat agar tetap sesuai dengan kebutuhan ikan serta upaya peningkatan kapasitas fisik lingkungan dalam mendukung kehidupan ikan salah satu diantaranya dengan pengembangan suaka ikan. Pada beberapa lokasi percontohan telah dibentuk Sekretariat Pengelolaan, pengembangan TPI perairan darat, serta penebaran benih ikan endemik.

2. Instrumen pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI

Telah dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan pengelolaan perikanan berbasis WPPNRI, antara lain:

- 1) Tersusunnya Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP);
- 2) Ditetapkannya Lembaga Pengelolaan Perikanan (LPP); dan
- 3) Ditetapkannya mekanisme pengaturan lainnya.

Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia.

1. Struktur Usaha Kelautan dan Perikanan yang Didominasi Skala Kecil dengan Penggunaan Teknologi yang Masih Tradisional

Meskipun sektor kelautan dan perikanan Indonesia memiliki potensi besar, namun masih didominasi oleh struktur usaha skala kecil. Dominasi struktur usaha ini menjadi permasalahan fundamental pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Sebagian besar pelaku usaha sektor perikanan tangkap beroperasi dalam skala mikro atau kecil, dengan modal terbatas, teknologi sederhana, dan jangkauan pasar yang terbatas. Sebagian besar nelayan masih menggunakan alat tangkap dan teknologi tradisional yang kurang efisien serta belum optimalnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan, termasuk masih minimnya pengetahuan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan bagi sebagian nelayan. Berdasarkan data, diketahui bahwa armada kapal penangkap ikan Indonesia terdiri dari 1.137.734 kapal, di mana kapal kecil (<10 GT) mewakili hampir 95% dari total armada, dengan 15% dari total armada merupakan perahu tanpa motor (KKP, 2025).

2. Tingginya Biaya Produksi

Tingginya biaya produksi merupakan salah satu kendala utama yang membayangi sektor perikanan di Indonesia. Permasalahan ini secara langsung mempengaruhi profitabilitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha para pelaku perikanan, terutama yang berskala kecil.

Di bidang perikanan tangkap, nelayan dihadapkan dengan biaya operasional melaut yang tinggi. 60-70% dari total biaya operasional melaut merupakan modal bahan bakar. Keterbatasan akses pada BBM bersubsidi mengakibatkan biaya operasional melaut membengkak. Kondisi ini diperparah dengan inflasi yang terjadi yang mengakibatkan naiknya harga bahan pokok seperti kenaikan harga beras, minyak, dan bahan pokok lainnya yang dibutuhkan untuk aktivitas melaut.

3. Sarana prasarana usaha penangkapan ikan

Pengembangan infrastruktur dan integrasi konektivitas sistem informasi antar pelabuhan perikanan belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada masih rendahnya produktivitas armada perikanan, terutama dalam pemenuhan standar laik tangkap dan laik simpan, serta rendahnya kualitas dan akurasi pendataan kapal dan alat penangkapan ikan. Selain itu, adopsi teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien masih terbatas. Tantangan ini diperkuat oleh belum terbangunnya konektivitas pemanfaatan usaha secara menyeluruh, khususnya pada skala nelayan kecil, belum terintegrasinya sistem perizinan antara pemerintah pusat dan daerah, serta masih minimnya pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam pelaporan dan pengelolaan usaha penangkapan ikan.

D. Lingkungan Strategis

Pembangunan perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya akan dielaborasi pada konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternatif dasar arah kebijakannya. Secara khusus, proses identifikasi akan ditelaah sampai pada lingkup kegiatan. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasikan ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah permusan alternatif arah kebijakan.

Tabel . Matriks SWOT Kegiatan di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Pengelolaan Sumber Daya Ikan			
Strengths (S)	Weaknesses (W)	Opportunities (O)	Threats (T)
• Tersedianya data potensi sumber daya ikan hasil riset nasional sebagai dasar pengelolaan • Implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya • Skema PNBP pascaproduksi mendukung optimalisasi penerimaan negara secara berkeadilan • Penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sebagai basis pengelolaan berbasis wilayah • Tersedianya regulasi teknis yang mengatur konservasi dan perlindungan SDI	• Belum optimalnya sistem pemantauan dan pengawasan secara daring (<i>real-time</i>) • Keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan SDM pengawas perikanan • Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kebijakan zonasi dan kuota tangkap • Belum terintegrasinya data SDI antar lembaga secara menyeluruh • Tantangan dalam akurasi dan konsistensi pelaporan data hasil tangkapan	• Pemanfaatan teknologi pemantauan modern seperti satelit pengawasan perikanan • Peluang dukungan pendanaan internasional untuk program konservasi dan penguatan tata kelola SDI • Peningkatan kolaborasi riset dengan lembaga akademik dan mitra pembangunan • Peningkatan kesadaran publik terhadap keberlanjutan sumber daya laut • Penerapan sistem penilaian stok secara periodik sebagai dasar pengaturan kuota	• Potensi kelebihan tangkap (<i>overfishing</i>) • Dampak perubahan iklim terhadap distribusi dan ketersediaan ikan • Pencemaran laut dari aktivitas industri, limbah rumah tangga, dan pertambangan • Masihmaraknya praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) • Degradasi ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove
Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan			
Strengths (S)	Weaknesses (W)	Opportunities (O)	Threats (T)
• Sistem perizinan kapal perikanan telah terintegrasi • Pemanfaatan teknologi pemantauan seperti VMS dan e-logbook untuk kapal ukuran besar • Tersedianya standar nasional untuk spesifikasi alat penangkapan ikan • Penerapan persyaratan	• Tingkat kepatuhan terhadap pelaporan masih rendah • Banyak kapal perikanan kecil belum teregistrasi dalam sistem nasional • Sebagianbesar kapal belum memenuhi standar keselamatan pelayaran • Masih terdapat	• Peluang modernisasi kapal perikanan rakyat melalui bantuan pemerintah dan skema pembiayaan • Integrasi data kapal dan alat penangkap dengan sistem informasi pusat. • Kemitraan dengan BUMN dan swasta dalam pembangunan	• Peredaran kapal eks-asing dan alat tangkap ilegal. • Potensi konflik penggunaan ruang laut dengan sektor lainnya • Risiko keselamatan akibat cuaca • Ekstrem yang meningkat.

laik tangkap dan laik simpan meningkatkan aspek keselamatan dan efisiensi • Peningkatan dan pengawasan terhadap pendaftaran dan pengukuran ulang kapal	penggunaan alat tangkap yang • Tidak ramah lingkungan Terbatasnya fasilitas perawatan dan galangan kapal di wilayah terpencil	dan perawatan kapal • Edukasi dan pelatihan penggunaan alat tangkap selektif dan adaptif • Pengembangan teknologi tangkap yang efisien dan ramah lingkungan	• Fluktuasi harga bahan baku kapal dan alat tangkap • Ancaman manipulasi sistem pemantauan berbasis teknologi
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			
Strengths (S)	Weaknesses (W)	Opportunities (O)	Threats (T)
• Tersedianya jaringan pelabuhan perikanan nasional yang tersebar di seluruh WPPNRI • Pelabuhan perikanan berfungsi sebagai simpul logistik, pusat pelayanan usaha, dan titik pengawasan • Beberapa pelabuhan telah ditetapkan sebagai lokasi implementasi PIT dan PNBP Pascaproduksi • Adanya kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjalankan fungsi operasional pelabuhan • Tersedianya regulasi terkait standar pelayanan minimal pelabuhan perikanan	• Sebagian besar pelabuhan belum memenuhi standar sarana dan prasarana • Keterbatasan fasilitas pendukung seperti cold storage, air bersih, dan BBM nelayan • Sistem informasi logistik dan produksi belum terintegrasi nasional • Rendahnya pemanfaatan pelabuhan oleh kapal skala kecil • Kurangnya SDM pelabuhan dengan kompetensi digital dan manajemen modern	• Penerapan konsep Pelabuhan berbasis teknologi dan efisiensi layanan • Integrasi pelabuhan perikanan dengan jalur logistik nasional • Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi melalui APBN dan pinjaman dan hibah luar negeri • Kolaborasi pengelolaan pelabuhan dengan BUMN dan swasta • Transformasi pelabuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kelautan daerah	• Kerentanan pelabuhan terhadap abrasi, rob, dan perubahan iklim • Potensi konversi lahan pelabuhan untuk kepentingan non-perikanan • Rendahnya alokasi pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur pelabuhan • Kelebihan kapasitas saat musim puncak produksi ikan. • Ketimpangan pelayanan antar wilayah barat dan timur Indonesia.
Pengelolaan Usaha Penangkapan Ikan			
Strengths (S)	Weaknesses (W)	Opportunities (O)	Threats (T)
• Potensi sumber daya ikan yang besar dan Beragam di seluruh perairan Indonesia • Kebijakan PIT memberikan kepastian berusaha berbasis kuota dan zonasi. • Adanya program industrialisasi perikanan untuk meningkatkan nilai tambah	• Sebagian besar usaha masih berskala kecil dan belum efisien secara ekonomi • Terbatasnya akses terhadap pasar, perbankan, dan informasi usaha • Kurangnya data usaha dan produksi aktual sebagai dasar perencanaan • Rendahnya pemanfaatan teknologi tangkap dan pasca-tangkap • Ketergantungan terhadap musim ikan dan BBM bersubsidi	• Transformasi rantai pasok berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi usaha • Pengembangan diversifikasi produk hasil tangkapan bernilai ekonomi tinggi • Peluang ekspor langsung melalui pelabuhan strategis • Pemanfaatan platform e-Commerce untuk akses pasar Domestik dan ekspor	• Fluktuasi harga ikan baik di pasar domestik maupun global • Ketidakstabilan pasokan akibat kondisi cuaca dan musim paceklik • Kenaikan biaya produksi akibat krisis energi dan logistik • Keterbatasan kapasitas manajerial pelaku usaha penangkapan

Pengelolaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan			
Strengths (S)	Weaknesses (W)	Opportunities (O)	Threats (T)
• Tersedianya program perlindungan seperti asuransi nelayan dan bantuan sarana produksi • Basis data nelayan melalui e-KUSUKA semakin terintegrasi • Kelembagaan nelayan lokal aktif dan berkembang • Adanya program prioritas seperti kampung Nelayan Maju dan Merah Putih • Dukungan pelatihan teknis dan pemberdayaan dari pemerintah pusat dan daerah • Kelembagaan pelaku usaha • mulai tumbuh melalui koperasi dan kelompok nelayan • Dukungan akses pembiayaan usaha melalui KUR sektor kelautan dan LPMUKP	• Rendahnya literasi digital dan finansial nelayan skala kecil • Ketimpangan akses pemberdayaan antar kelompok masyarakat nelayan • Belum optimalnya jangkauan program ke wilayah 3T • Minimnya partisipasi nelayan dalam perencanaan program • Ketergantungan terhadap program bantuan yang bersifat sementara	• Transformasi kelembagaan nelayan menjadi entitas ekonomi berbasis koperasi • Penguatan sistem layanan nelayan berbasis digital dan inklusif • Pendekatan pemberdayaan berbasis wilayah dan potensi lokal. • Kemitraan strategis dengan dunia usaha dan lembaga internasional • Regenerasi nelayan melalui wirausaha nelayan muda. • Pembentukan koperasi modern dan kemitraan dengan pelaku industri	• Penurunan minat generasi muda menjadi nelayan • Krisis iklim dan bencana pesisir mengancam sumber penghidupan • Ketimpangan kesejahteraan antar wilayah pesisir. • Potensi konflik sosial akibat distribusi bantuan yang tidak merata • Stigmatisasi negatif terhadap profesi nelayan di masyarakat urban

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Pembangunan Nasional

1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dalam RPJMN 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini menegaskan bahwa proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Sebagai Kementerian yang membantu Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2025-2029 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

KKP berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan melalui tiga tujuan utama pembangunan (*ultimate goals*) yaitu: 1) melindungi laut dan sumber dayanya; (2) mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan dalam rangka penyediaan pangan biru (*blue food*), pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta (3) menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Dalam mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta tiga tujuan utama pembangunan (*ultimate goals*), Visi KKP tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

2. Misi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam 8 (delapan) Asta Cita yaitu:

1. **Asta Cita 1** : Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. **Asta Cita 2** : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. **Asta Cita 3** : Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. **Asta Cita 4** : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas.
5. **Asta Cita 5** : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. **Asta Cita 6** : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. **Asta Cita 7** : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. **Asta Cita 8** : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung tujuh dari delapan Asta Cita terutama Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **“Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”** yang melaksanakan **Asta Cita 8**;
2. **“Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”** yang melaksanakan **Asta Cita 2, 3, 5, dan 6**;
3. **“Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”** yang melaksanakan **Asta Cita 4**; dan
4. **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas”** yang melaksanakan **Asta Cita 7**.

3. Tujuan

Tujuan dari pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas..

4. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan serta dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa sasaran program yang dilaksanakan, terdiri dari:

1. **Sasaran Strategis Pertama (SS-1)** yaitu Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut.

Sasaran Strategis yang akan dicapai adalah “Terlindunginya Laut dan Sumber Dayanya serta Menjaga Kelestarian Wilayah Laut”, dengan indikator kinerja:

- a. Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari 30 Juta ha pada tahun 2025 menjadi 32,5 Juta ha pada tahun 2029;
- b. Persentase penurunan volume sampah yang masuk ke laut dari 1% pada tahun 2025 menjadi 70% pada tahun 2029; dan

2. **Sasaran Strategis Kedua (SS-2)** yaitu Meningkatkan Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sasaran Strategis yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, dengan indikator kinerja:

- a. PDB perikanan dari Rp 595,06 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp 718,98 triliun pada tahun 2029;
- b. Volume produksi perikanan dari 24,58 juta ton pada tahun 2025 menjadi 30,16 juta ton pada tahun 2029;
- c. Volume produksi garam dari 2,25 juta ton pada tahun 2025 menjadi 5,2 juta ton pada tahun 2029;
- d. Indeks pembangunan pulau-pulau kecil (Skala 0-1) dari 0,49 pada tahun 2025 menjadi 0,61 pada tahun 2029;
- e. Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir dari 13,6% pada tahun 2025 menjadi 100% pada tahun 2029;
- f. Indeks kepatuhan sektor kelautan dan perikanan dari 76 pada tahun 2025 menjadi 83,8 pada tahun 2029; dan
- g. Kelembagaan ekonomi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang terfasilitasi dari 4 lembaga pada tahun 2025 menjadi 37 lembaga pada tahun 2029.

3. **Sasaran Strategis Ketiga (SS-3)** yaitu Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional.

Sasaran Strategis yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional”, dengan indikator kinerja:

- a. Nilai ekspor hasil perikanan dari USD 6,25 miliar pada tahun 2025 menjadi USD 8,5 miliar pada tahun 2029;
- b. Konsumsi ikan masyarakat dari 26,26 kg/kapita/tahun pada tahun 2025 menjadi 28,63 kg/kapita/tahun pada tahun 2029; dan
- c. Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dari 70% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2029

4. **Sasaran Strategis Keempat (SS-4)** yaitu Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan; dan

Sasaran Strategis yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029

5. **Sasaran Strategis Kelima (SS-5)** yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas

Sasaran Strategis yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Dan Berkualitas”, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi KKP dari 90,05 pada tahun 2025 menjadi 90,25 pada tahun 2029.

B. Pembangunan Perikanan Tangkap

1. Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT)

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Patisipatif, Berkelanjutan dan Menyejahterakan Nelayan” untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

2. Misi DJPT

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fokus pada misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.

3. Tujuan DJPT

Menjabarkan misi DJPT, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap adalah:

- a. Menjamin kelestarian sumber daya ikan melalui penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan pengawasan berbasis wilayah pengelolaan.
- b. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan melalui pemanfaatan teknologi, modernisasi armada, dan integrasi sistem logistik hasil tangkapan.
- c. Mengembangkan infrastruktur pelabuhan perikanan sebagai simpul layanan terpadu dan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan.
- d. Memperkuat kelembagaan, perlindungan, dan pemberdayaan nelayan, termasuk nelayan kecil, perempuan, dan pemuda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing.
- e. Meningkatkan tata kelola perikanan tangkap yang transparan dan akuntabel, melalui penguatan regulasi, perizinan, pemantauan, serta sistem data dan informasi perikanan

4. Sasaran Program DJPT

Sasaran program perikanan tangkap merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJPT sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan, SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas. Sasaran Program DJPT 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Kesejahteraan nelayan meningkat dengan indikator Nilai Tukar Nelayan dengan target 105 pada tahun 2025 menjadi 109 pada tahun 2029.
- b. Meningkatnya produksi perikanan tangkap secara berkelanjutan dengan indikator Volume Produksi Perikanan Tangkap dengan target 6,19 juta ton pada tahun 2025 menjadi 7,50 juta ton pada tahun 2029.
- c. Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan dengan indikator Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang berada pada batas biologis yang aman dengan target ≤ 80 persen pada tahun 2025 hingga 2029.
- d. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel DJPT dengan indikator Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap dengan target nilai 86 pada tahun 2025 menjadi 88 pada tahun 2029.

C. Pembangunan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan

1. Visi PPS Belawan

Visi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan 2025-2029 mengacu pada Visi DJPT yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Perikanan Tangkap yang Patisipatif, Berkelanjutan dan Menyejahterakan Nelayan” untuk mewujudkan “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

2. Misi PPS Belawan

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan Misi Asta Cita sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi 8%, penurunan tingkat kemiskinan 0%, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dengan fokus pada misi Asta Cita ke-2: Swasembada pangan dan ekonomi biru.

3. Tujuan PPS Belawan

Menjabarkan misi pada tujuan DJPT diatas, maka tujuan pembangunan perikanan tangkap pada PPS Belawan adalah:

1. Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan yang berwawasan lingkungan sesuai kebutuhan operasional;
2. Tersedianya produk perikanan bermutu, berdaya saing dan berkelanjutan untuk usaha perikanan;
3. Meningkatkan investasi usaha perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan;
4. Tersedianya sistem informasi Pelabuhan Perikanan yang mudah diakses;

5. Meningkatnya kompetensi SDM di Pelabuhan Perikanan;
6. Meningkatnya kebersihan, keamanan, ketertiban, keselamatan kerja dan keindahan (K5) di Pelabuhan Perikanan.

4. Sasaran Program dan Kegiatan PPS Belawan

Sasaran program pembangunan perikanan tangkap merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh PPS Belawan sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran program PPS Belawan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
2. Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan meningkat
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang optimal dan bertanggung jawab
4. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di
5. Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan
6. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

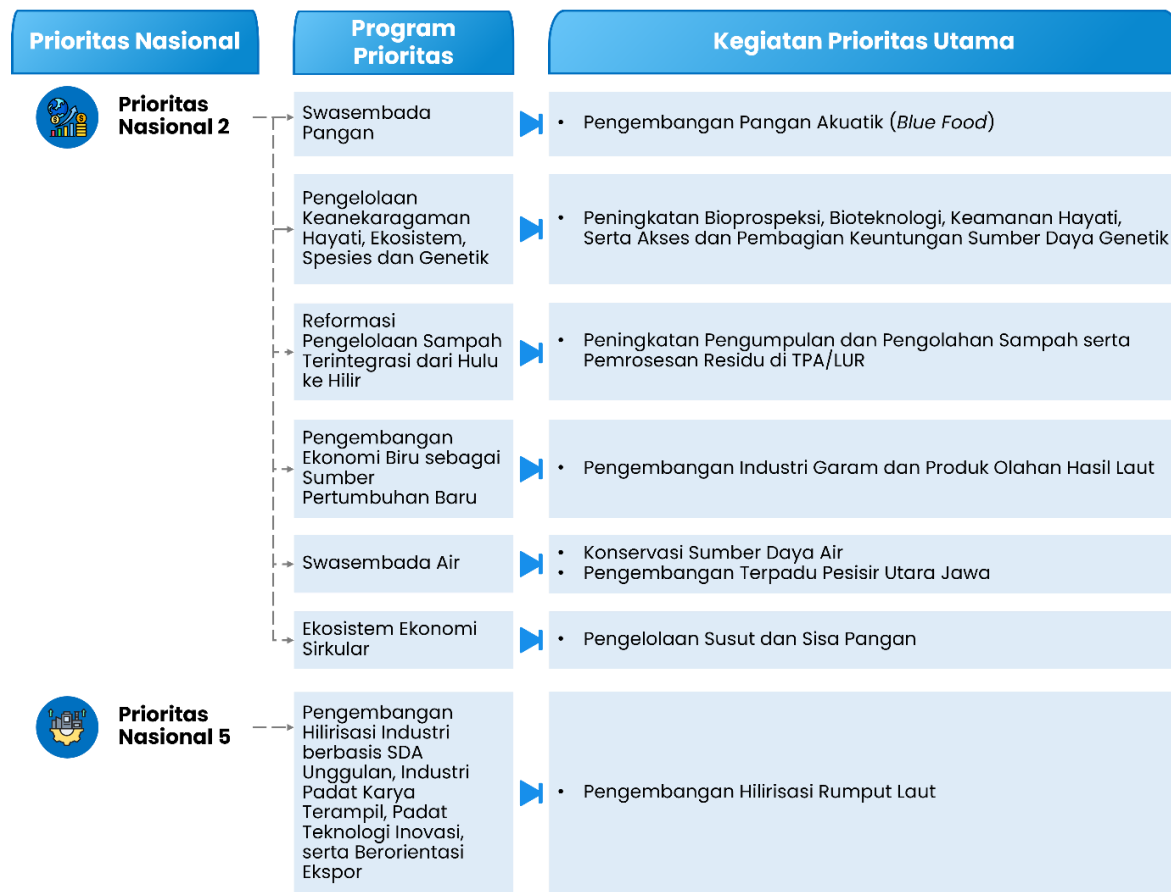
Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan penggabungan antara Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I. RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan delapan Prioritas Nasional sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung Asta Cita. Prioritas Nasional tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan strategi Rencana Strategis KKP 2025-2029.

KKP juga berkontribusi dalam pencapaian kegiatan prioritas dalam RPJMN 2025-2029 pada Prioritas Nasional (Asta Cita) ke-2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan. PSN ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan PSN dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah.

Major Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunannya. Di dalam pendanaannya dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (innovative financing) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Blended Finance, Green Finance serta Output Based Transfer/Hibah ke daerah

KKP berkontribusi dalam pencapaian indikator sasaran kegiatan prioritas dalam RPJMN 2025-2029 yang dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1. *Major Project* Prioritas Nasional 2025-2029 terkait KKP

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, arah kebijakan dan pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan *mindset* bahwa pembangunan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dengan melindungi laut dan sumber dayanya, mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem perairan sebagai rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Terdapat empat aspek yang melandasi kerangka pikir pembangunan ekonomi biru, yaitu:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai *Main System* Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang didorong untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional maka sektor kelautan dan perikanan harus menjadi *leading sector* yang harus mendapatkan sokongan oleh sektor lainnya dalam setiap konteks pembangunan nasional.

2. Ekologi Sebagai Panglima

Pembangunan kelautan dan perikanan memprioritaskan pada perlindungan laut untuk memberikan ruang hidup bagi sumber daya hayati yang ada di laut, pesisir dan

pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Laut merupakan episentrum serapan karbon dunia yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim dan gas rumah kaca. Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki harus dioptimalkan secara berkelanjutan sehingga menjadi *champion* di pasar global.

3. **Market Driven Oriented**

Pembangunan kelautan dan perikanan harus dapat mudah beradaptasi terhadap tuntutan pasar domestik dan global sehingga daya saing kompetitif dan komparatif harus terus ditingkatkan.

4. **Pendekatan Teknologi**

Pendekatan teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mengakses informasi secara akurat dan *real-time*, serta mendorong pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan antara lain: pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi satelit, serta teknologi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan kelautan dan perikanan memperhatikan 4 prinsip pembangunan yaitu; 1) **Tematik**, mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah; 2) **Holistik**, mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan; 3) **Integratif**, sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan 4) **Spasial**, pengembangan kawasan berbasis daya dukung secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan 3 aspek keberlanjutan yaitu; sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Maka, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 adalah: 1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut; 2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; 3) Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan; 4) Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih baik, pemerintah telah mengidentifikasi lima arah kebijakan pengarusutamaan yang bersifat inovatif dan adaptif. Kelima arah kebijakan ini saling terkait dan bertujuan untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan serta menjadi landasan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. **Gender dan Inklusi Sosial**

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 43 tahun 2023 tentang Pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PUG, agar setiap unit organisasi dapat menyusun perencanaan yang responsif gender melalui penyusunan kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup :

- a. Penguatan tujuh PUG, yakni: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. Penyiapan roadmap PUG;
- d. Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit kerja Eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. Pembuatan profil gender;
- f. Keberpihakan pemenuhan hak anak dan kaum rentan kelautan dan perikanan; dan
- g. monitoring dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan/*goal*, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar dimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan. KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB nomor 14, yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya :

- a. Mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. Meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan pengendalian terhadap perubahan iklim;
- c. Mengelola dan melindungi ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- d. Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. Mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. Melestarikan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- g. Mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. Meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budi daya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- i. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
- k. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam The United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

KKP juga mendukung pencapaian target TPB nomor 1 "Tanpa Kemiskinan" (*No Poverty*), nomor 2 "Tanpa Kelaparan" (*Zero Hunger*), nomor 7 "Energi Bersih dan Terjangkau" (*Affordable and Clean Energy*), nomor 8 "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi" (*Decent Work and Economic Growth*), nomor 9 "Industri,

Inovasi, dan Infrastruktur” (*Industry Innovation and Infrastructure*), nomor 12 “Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab” (*Responsible Consumption and Production*), nomor 13 “Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*), dan nomor 17 “Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan” (*Partnership for the Goals*).

3. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek kemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (*on-line*), serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon merupakan pendekatan yang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan, yakni dengan memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Indonesia telah menerapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, yang memberikan nilai ekonomi terhadap setiap unit emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dengan implementasi di berbagai sektor, termasuk sektor kelautan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025. Berdasarkan Permen tersebut, penyelenggaraan NEK di sektor kelautan dilakukan melalui mekanisme Perdagangan Karbon dan Pembayaran Berbasis Kinerja. Adapun lingkup dari penyelenggaraan NEK di sektor kelautan antara lain adalah pengelolaan karbon biru; penangkapan ikan; pembudidayaan ikan; pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan kegiatan lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan untuk mendukung aktivitas pembangunan yang rendah emisi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah dan non-pemerintah. Keterlibatan pihak non-pemerintah terus didorong melalui inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan, serta investasi hijau yang berkelanjutan.

Pembangunan rendah karbon merupakan pendekatan yang berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan, yakni dengan memastikan keselarasan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang. Indonesia telah menerapkan kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, yang memberikan nilai ekonomi terhadap setiap unit emisi GRK, dengan implementasi di berbagai sektor, termasuk sektor kelautan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025. Berdasarkan

Permen tersebut, penyelenggaraan NEK di sektor kelautan dilakukan melalui mekanisme Perdagangan Karbon dan Pembayaran Berbasis Kinerja. Adapun lingkup dari penyelenggaraan NEK di sektor kelautan antara lain adalah pengelolaan karbon biru, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan kegiatan lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Pembangunan berketahanan iklim menjadi strategi utama untuk menekan potensi penurunan Pendapatan Domestik Bruto. Dampak perubahan iklim yang berlangsung dalam kurun waktu yang relatif panjang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, penurunan hasil tangkapan nelayan, kehilangan mata pencaharian, serta serangan penyakit sensitif iklim. Implementasi pembangunan berketahanan iklim mendorong *multistakeholder* untuk peningkatan infrastruktur berketahanan iklim, penerapan teknologi, peningkatan tata kelola dan pendanaan iklim, serta peningkatan kapasitas pada masyarakat dan pemerintah.

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap

Pendekatan Konseptual

Pembangunan sebuah sub sektor harus mulai dikembangkan ke dalam proses yang lebih dinamis; mempertimbangkan isu terkini serta berupaya mengantisipasi tantangan di masa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan. Selain itu dalam kerangka sistem perencanaan nasional, pembangunan sebuah sub sektor juga sudah seharusnya memiliki referensi yang erat dengan pembangunan pada skala yang lebih luas yakni sektoral maupun nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung kerangka kebijakan ekonomi biru yaitu:

1. Melindungi laut dan sumber dayanya, dengan aspek memperluas Kawasan konversi laut
2. Mengurangi tekanan dari aktivitas perikanan yang tidak ramah, dengan aspek yaitu:
 - a) Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kuota
 - b) Pengembangan Perikanan Budidaya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan
3. Menjaga kelestarian wilayah laut, dengan aspek yaitu:
 - a) Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - b) Pengendalian Sampah Plastik di Laut
 - c) dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Bisnis proses perikanan tangkap merupakan sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana usaha perikanan tangkap berjalan, mulai dari penjabaran kegiatan input, interaksi antar kegiatan, sampai pada alur pencapaian output dari pembangunan sub-sektor perikanan tangkap. Bisnis proses juga biasanya mengidentifikasi keterlibatan *stakeholder* serta

menjelaskan hubungan keterkaitannya. Dengan demikian hal tersebut menegaskan kembali bahwa dalam konteks perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap, penyertaan kerangka bisnis proses sebagai dasar menjadi bersifat mutlak.

Mengacu pada perkembangan terkini konsep pengelolaan perikanan, manajemen perikanan tangkap akan diperspektifkan ke dalam 3 aspek utama yakni: 1) Manajemen nelayan; 2) Manajemen sumber daya ikan; serta utilisasi keduanya melalui 3) Manajemen usaha penangkapan ikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajemen Nelayan

Manajemen nelayan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni dukungan terhadap usaha perikanan nelayan serta dukungan terhadap *social security* nelayan. Dukungan usaha perikanan bertujuan untuk mengakselerasi usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, seperti misalnya perbaikan mindset, peningkatan kapasitas terhadap penggunaan teknologi, serta fasilitasi akses pendanaan.

Adapun dukungan terhadap *social security* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga nelayan, melalui diversifikasi usaha serta fasilitasi penyaluran jaminan kesehatan, pendidikan, maupun perbaikan lingkungan permukiman nelayan. Manajemen nelayan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan kenelayanan.

2. Manajemen Sumber Daya Ikan

Manajemen sumber daya ikan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni pengaturan alokasi (sumber daya ikan dan izin) serta pemantauan pelaksanaan perizinan. Pengaturan alokasi mencakup instrumen pengalokasian SDI dan izin oleh pemerintah pusat serta proses pemberian izin baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun upaya integrasi izin pusat-daerah.

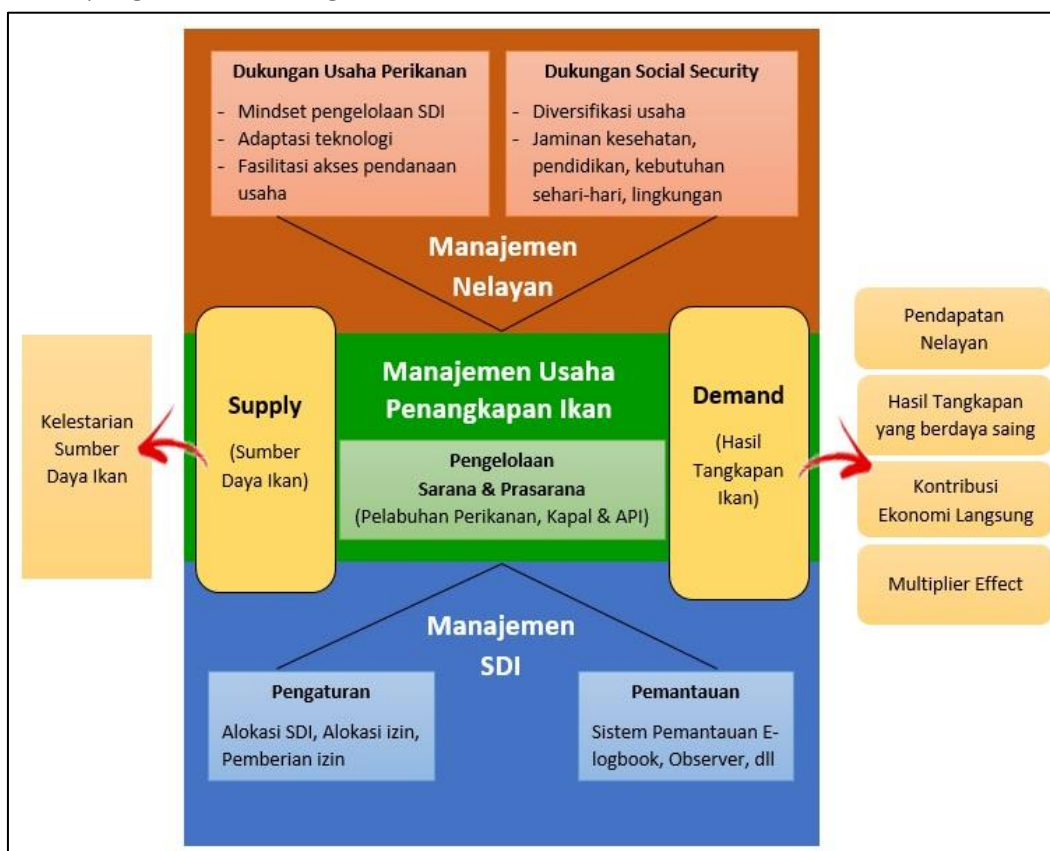
Adapun pemantauan pelaksanaan perizinan dilakukan melalui instrumen penerapan e-logbook, penempatan observer, serta peningkatan kepatuhan pada laporan LKU-LKP. Optimalisasi manajemen sumber daya ikan, utamanya akan dapat tercapai seiring konsep pengelolaan berbasis WPP diterapkan secara penuh. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan kegiatan pengelolaan perizinan.

3. Manajemen Usaha Penangkapan Ikan

Manajemen usaha penangkapan ikan berisi segala mekanisme terkait pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan, sehingga sifatnya merepresentasikan irisan antara manajemen sumber daya ikan dan manajemen nelayan. Selain itu, manajemen usaha penangkapan ikan juga dapat dianggap sebagai ujung tombak sinergi antara penyediaan *supply* (sumber daya ikan) dan pemenuhan *demand* (hasil tangkapan ikan).

Mengacu pada peran strategis tersebut, manajemen usaha penangkapan ikan sebenarnya menjadi tahapan yang paling penting dalam mencapai berbagai outcome pembangunan perikanan tangkap, yakni meliputi peningkatan kelestarian sumber daya ikan, pendapatan nelayan, daya saing hasil tangkapan, kontribusi ekonomi langsung, serta *multiplier effect* lainnya. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Semakin tingginya faktor permintaan terhadap produk perikanan serta adanya potensi keterbatasan dukungan ekosistem perikanan, seringkali semakin mendorong ketidakseimbangan terhadap usaha penangkapan ikan yang ideal. Pembelajaran pada periode pembangunan sebelumnya tahun 2015-2019 semakin memperlihatkan bahwa tren pengelolaan perikanan tangkap di masa mendatang akan semakin mengerucut pada permasalahan *supply* dan *demand*. Untuk memenuhi keseimbangan *supply-demand* tersebut, hubungan 3 aspek utama dalam konsep manajemen perikanan harus berjalan secara seimbang, yakni antara aspek sosial, ekonomi serta aspek lingkungan ataupun seringkali direpresentasikan melalui hubungan antara *stakeholder* nelayan, pengusaha, dengan pemerintah (**Gambar 3.2**). Penggunaan pendekatan *supply-demand* juga dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan utama industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



Gambar 3.2. Implementasi Pendekatan *Supply-Demand* terhadap Manajemen Perikanan Tangkap

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke dalam 2 arah kebijakan yakni 1) Kebijakan Pokok dan 2) Kebijakan Pengarusutamaan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya.



Gambar 3.3. Pendekatan Perencanaan Strategis Sub Sektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, Serta Kegiatan Prioritas

1. Kebijakan Pokok

- a. Membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual

Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan: 1) Kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi sub bidang perikanan tangkap; 2) Konsultasi publik dengan stakeholder untuk perumusan kebijakan; 3) Pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan; 4) Koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; 5) Kunjungan kerja dan diskusi stakeholders di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara bertanggungjawab berbasis website dan transparansi, dan berbasis riset dan pengetahuan faktual.

- b. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata

kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Optimalisasi Produktivitas Sarana Prasarana Perikanan Tangkap

Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan.

Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi sarana-prasarana penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya.

Dalam upaya mewujudkan optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- b) Peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- c) Peningkatan standarisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik tangkap dan laik simpan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- d) Peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- e) Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);
- f) Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;

- g) Optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- h) Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional; 2. Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta; 3. Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan; 4. Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2) Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap yang Terintegrasi

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Pengelolaan berbasis WPP pun mendorong secara spesifik peran infrastruktur perikanan tangkap, utamanya pelabuhan perikanan untuk semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPP, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan prioritas “Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan mutu ikan dan penerapan standarisasi ramah lingkungan melalui *Eco Fishing Port*, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI;

- b) Penguatan SDM dan fungsi kesyahbandaran; intensifikasi pelibatan pemerintah daerah;
- c) Standarisasi ketersediaan-kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKOPP);
- d) Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- e) Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
- f) Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam).

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Alternatif pembiayaan dalam pembangunan fisik infrastruktur pelabuhan perikanan; 2. Sinergitas beberapa regulasi sebagai landasan pengembangan PP; terkait a) Pemerintahan Daerah, khususnya pada proses pengalihan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) PP dan b) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil); 3. Optimalisasi peningkatan peran PP sebagai sentra ekonomi dan pusat aktivitas nelayan; utamanya untuk memudahkan fungsi kontrol pemerintah; 4. Intensifikasi tata kelola pengembangan PP secara nasional, baik yang melalui penganggaran APBN KKP, DAK, APBD maupun swasta.

3) Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPP telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPP diarahkan untuk berperan sebagai management authority yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPP, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, serta sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPP.

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan umum daratan; mempertimbangkan tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan umum daratan seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol. Di sisi lainnya peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus didorong melalui perluasan cakupan penerapan e-logbook serta penempatan observer on board pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan operasionalisasi lembaga WPP dalam pengawasan, pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat-daerah dan antar-daerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;
- b) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan e-logbook secara nasional untuk kapal > 5 GT, serta perluasan cakupan observer di atas kapal perikanan;
- c) Penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;
- d) Peningkatan produktivitas perairan umum daratan, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat);
- e) Peningkatan produktivitas ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO; dan
- f) Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (*traceability*) hasil tangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Penguatan basis data pengalokasian SDI; intensifikasi koordinasi dengan otoritas penyusun stok SDI dan akademisi (<i>backward linkage</i>); 2. Penguatan fungsi manajemen pemanfaatan SDI melalui pengendalian perairan overfishing dan optimalisasi perairan underfishing; Intensifikasi koordinasi dengan unit kerja pemanfaatan usaha (<i>forward linkage</i>), seperti dalam alokasi izin, kapal, dan pengembangan PP; 3. Intensifikasi koordinasi dengan Pemda terkait operasionalisasi WPP, penyelesaian andon, pemanfaatan perairan umum daratan.

4) Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap

Upaya pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries* (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselerasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPP, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni antar K/L (KKP dan Kemenhub) maupun antara pusat-daerah (KKP dan Pemda). Dengan cakupan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pemutakhiran penggunaan *e-service* dan *platform* yang terintegrasi perlu terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang real-time, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan dan penyebarluasan SILAT;
- b) Sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kemenhub, termasuk upaya integrasi maupun intensifikasi pelaksanaan gerai di daerah;
- c) Sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- d) Pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan *e-services*;
- e) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- f) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Sinergitas regulasi terkait Pemerintahan Daerah; kewenangan perizinan dan penerbitan BPKP oleh pemerintah daerah
2. Sinergitas peraturan daerah (Perda) terkait sistem perizinan, dalam upaya mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah
3. Inovasi teknologi dalam pelaporan usaha untuk meningkatkan kualitas data pemanfaatan SDI dan potensi pendapatan negara

5) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan

Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, namun dengan beberapa catatan seperti perlunya

pelibatan aktif pemerintah daerah maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar lebih memperhatikan perspektif stakeholder utama nelayan serta memposisikan DJPT bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan *social security* masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin, termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan, mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis, nelayan akan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus untuk membentuk jaring pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi *force majeure* seperti bencana alam.

Dalam hal ini peran DJPT perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayanan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah.

Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- b) Perlindungan dan bantuan nelayan melalui bantuan premi asuransi nelayan, termasuk perluasan skema asuransi mandiri, bantuan sarana penangkapan ikan, dll;
- c) Pemberdayaan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- d) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), dll;
- e) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan dan intensifikasinya termasuk melalui akses LPMUKP dan sertifikasi hak atas tanah nelayan, serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan; dan
- f) Penguatan informasi kenelayanan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan
1. Penguatan database kenelayanan untuk menjangkau kerjasama pemberdayaan-perlindungan nelayan dengan lintas sektor, pemda, swasta; 2. Penguatan jalur & mekanisme komunikasi dengan nelayan untuk pemetaan kebutuhan nelayan secara tepat dan responsif; 3. Mengarusutamakan nelayan sebagai subjek pemberdayaan, melalui perubahan mindset dan kapasitas nelayan untuk mandiri; bukan lagi hanya sebagai objek.

c. Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas

Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu: 1) *Human Capital*; 2) *Organisation Capital (Right Sizing Organisation)*; 3) *Finacial and Planning Capital*; 4) *Information Capital*, serta 5) *Control Capital*.

Di masa mendatang, tantangan sub-sektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai unit kerja *think-tank*; berperan dalam memberikan berbagai saran-pertimbangan, memberikan respon cepat (*quick analysis*), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk: 1) Peningkatan inovasi program; 2) Intensifikasi manajemen berbasis IT; 3) Peningkatan skala kerjasama bidang perikanan tangkap baik di lingkup KKP (antar Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta); 4) Penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan; 5) Harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan 6) Penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

K/L LAIN	PEMDA	KKP
PU-PERA Jalan / Rumah / Dermaga Pelabuhan / air bersih	Penyiapan lahan	Tata ruang/zonasi/masterplan
KEMEN-ATR Sertifikasi Tanah Nelayan	Identifikasi permasalahan di daerah	Sarana Sistem Rantai Dingin
KEMENDAGRI Percepatan P3D, sinergi pusat-daerah	Identifikasi / pengurusan administrasi / penyaluran bantuan	Penyuluhan, Pelatihan, Penguatan kelembagaan kelompok
KEMEN-KOPERASI Pembentukan / Pembinaan Koperasi	Manajemen data kenelayanan	Riset teknologi perikanan tangkap
KEMHUB Pengukuran GT, dokumen kapal	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP	Pengawasan SDKP
KEMENDES Sinergi dana desa, desa nelayan	Sinergi pembiayaan kegiatan prioritas nasional di daerah	Sarana Pemasaran
KEMENKOMAR Koordinasi / sinkronisasi, peluang investasi	Menggalang dukungan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya	BUMN
	Integrasi sistem perizinan	Swasta
	Pengembangan pelabuhan	

Gambar 3.4. Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap

2. Kebijakan Pengarusutamaan

a. Tujuan Pembangunan berkelanjutan

Strategi pelaksanaan meliputi: 1) Penerapan konsep ekonomi hijau; 2) Penerapan konsep *eco fishing port*; 3) Alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; 4) Inovasi teknologi API ramah lingkungan.

b. Gender

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.

c. Modal sosial budaya

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.

d. Transformasi digital

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (*e-logbook*, *e-services* perizinan, *e-layar*, dll).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan *multiplier effect* pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada stakeholder. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan

Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT)	Merupakan platform pengajuan izin usaha perikanan tangkap yang memungkinkan penerbitan izin dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, dan keseluruhan prosesnya dilakukan secara online. Intensifikasi penggunaan serta berbagai pemutakhiran sistem perizinan masih terus akan dilakukan. Upaya reformasi perizinan ini merupakan salah satu gebrakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi perikanan tangkap
Pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol	Peluang pemanfaatan investasi tuna diprediksi dapat mencapai Rp 7 Triliun. Seiring upaya diplomasi yang terus diintensifikasi dengan pengelola perikanan regional-RFMO, upaya peningkatan investasi-industrialisasi serta peningkatan kapasitas nelayan lokal pada komoditas TCT terus diakselerasi
Penyederhanaan regulasi	Dalam rangka mewujudkan usaha penangkapan ikan yang berkeadilan serta iklim investasi yang baik, sejumlah peraturan disederhanakan dan beralih pada hukum positif. Beberapa substansi penyederhanaan utama meliputi kemudahan perizinan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, kemudahan transshipment, batasan ukuran kapal yang lebih berdaya saing di ZEEI-laut lepas serta lebih melindungi nelayan kecil di perairan kepulauan
Pelabuhan Perikanan Unggul	Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan serta ketetelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) <i>Eco Fishing Port</i> , yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan
Kampung Nelayan Maju	Konsep perwujudan lingkungan permukiman nelayan yang maju, bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Salah satu strategi pengembangannya adalah melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan kawasan wisata bahari-kuliner

Kegiatan Prioritas DJPT	Gambaran Umum
Armada Perikanan yang Kompetitif	Untuk mewujudkan industrialisasi perikanan, diperlukan armada perikanan (kapal perikanan, alat penangkapan ikan, awak kapal perikanan), serta manajemennya yang kompetitif. Konsep yang diusung yakni pemenuhan aspek ketertelusuran (<i>traceability</i>), standar keamanan kapal, penanganan ikan (<i>fish handling</i>), serta standar keselamatan kerja

D. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi pembangunan perikanan tangkap tahun 2025–2029 difokuskan pada penyempurnaan sistem hukum dan kebijakan untuk mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), optimalisasi penerimaan negara, serta transformasi tata kelola usaha penangkapan ikan dan pelabuhan perikanan. Regulasi-regulasi ini disusun untuk meningkatkan kepastian hukum, efisiensi perizinan, keadilan dalam pemanfaatan sumber daya ikan, serta efektivitas pengawasan dan pelaporan berbasis data. Dalam periode ini, arah pembaruan regulasi tidak hanya menasar aspek teknis operasional, tetapi juga menyentuh dimensi fiskal, kelembagaan, dan digitalisasi pelayanan publik.

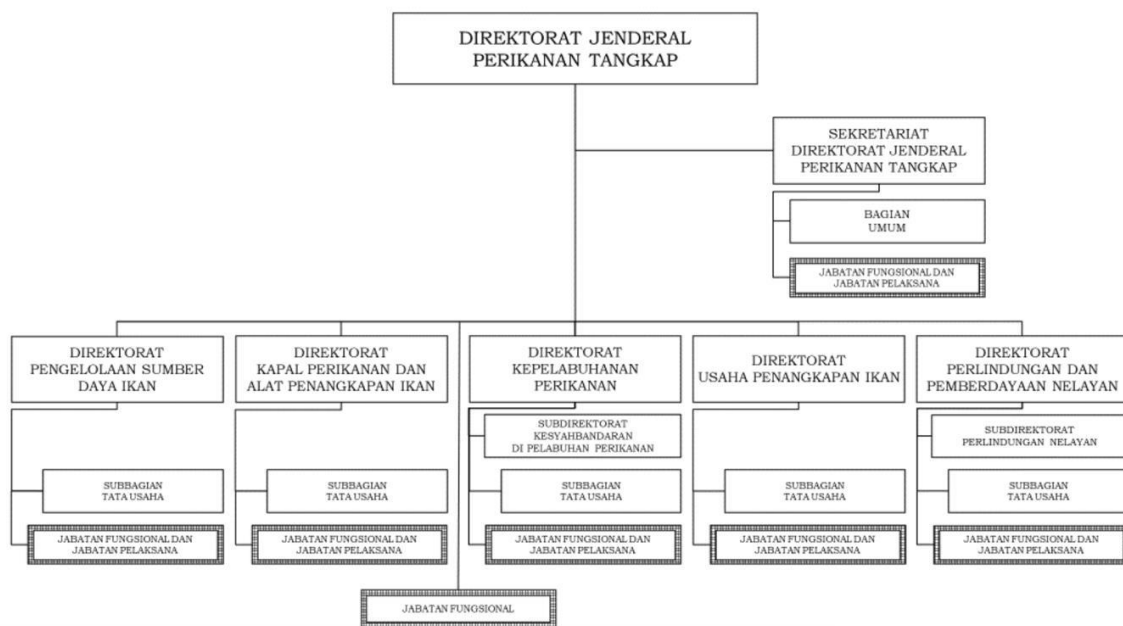
Sejumlah regulasi prioritas akan direvisi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk mengakomodasi skema perizinan PIT berbasis kuota dan zona, serta Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 terkait tarif PNBP yang perlu disesuaikan dengan prinsip produktivitas dan keadilan. Revisi juga mencakup Permen KP Nomor 1 dan 2 Tahun 2023 yang mengatur nilai produksi ikan dan tata cara pengenaan tarif PNBP, serta Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 sebagai dasar pelaksanaan teknis kebijakan PIT. Di samping itu, akan disusun regulasi baru seperti Permen KP tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan, Permen KP tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, serta Keputusan Menteri dan Keputusan Dirjen yang mendukung pelaksanaan PIT, pengelolaan kuota, serta klasifikasi dan wilayah kerja pelabuhan perikanan. Dengan kerangka regulasi yang diperkuat dan disesuaikan secara menyeluruh, pembangunan perikanan tangkap diharapkan mampu berjalan secara terukur, transparan, dan efisien. Harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan teknis ini juga menjadi fondasi penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, serta memperkuat peran negara dalam menjamin kesejahteraan nelayan dan pelaku utama perikanan secara adil dan berkelanjutan. Secara rinci, rencana kerangka regulasi di lingkup DJPT selama periode 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Matrik Kerangka Regulasi.

E. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan pembangunan perikanan tangkap 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat struktur organisasi, peran unit pelaksana teknis, serta sinergi antar pemangku

kepentingan guna mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, produktif, dan terukur. Reformasi kelembagaan dilakukan untuk menjawab kebutuhan implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), optimalisasi fungsi pelabuhan perikanan, serta penyediaan layanan publik yang responsif, digital, dan berbasis kinerja. Penguatan kelembagaan Ditjen Perikanan Tangkap dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan kelembagaan di tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), termasuk pergeseran paradigma dari orientasi produksi menuju keberlanjutan, serta penyesuaian terhadap mandat yang diberikan, baik secara konstitusional, teknis, pembangunan, maupun organisasi. Selain itu, kerangka kelembagaan juga disusun dengan memperhatikan dinamika kebijakan pembangunan nasional, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta regulasi sektoral yang berlaku, dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran (*right sizing*), kesatuan fungsi (*unified function*), efektif, efisien, dan transparan sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan. Reformasi kelembagaan ini turut diperkuat dengan peningkatan tata laksana dan kapasitas sumber daya aparatur agar selaras dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan operasional di lapangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Struktur organisasi Ditjen Perikanan Tangkap dan UPT PPS Belawan sebagaimana ditampilkan pada Gambar berikut:



Gambar 3.5. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Gambar 3.6. Bagan Struktur Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan

BAB 4

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program Ditjen Perikanan Tangkap yang dilaksanakan melalui program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada PPS Belawan sebagaimana tersaji berikut:

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Tangkap pada PPS Belawan

SASARAN / INDIKATOR		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program: Kesejahteraan nelayan meningkat						
IK.1	Indikator Kinerja: Nilai Tukar Nelayan (NTN) (indeks)	105	106	107	108	109
	Sasaran Kegiatan: -	-	-	-	-	-
	Indikator Kegiatan: -	-	-	-	-	-
Sasaran Program: Meningkatnya produksi perikanan tangkap secara berkelanjutan						
IK.2	Indikator Kinerja: Volume Produksi Perikanan Tangkap (Juta Ton)	6,19	6,47	6,84	7,22	7,50
SK.1	Sasaran Kegiatan: Nilai PNB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan					
IKK.1	Indikator Kegiatan: Penerimaan PNB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Rp. Juta)	822,55	825,55	830,55	835,55	840,55
SK.2	Sasaran Kegiatan: Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan meningkat					
IKK.2	Indikator Kegiatan: Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Ton)	11.000	11.500	12.500	13.000	13.500
SK.3	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang optimal dan bertanggung jawab					
IKK.3	Indikator Kegiatan: Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)	100	100	100	100	100
IKK.4	Indikator Kegiatan: Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)	84	85	86	87	88

SASARAN / INDIKATOR		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKK.5	Indikator Kegiatan: Tingkat pelayanan kesyahbandaran pelabuhan perikanan samudera belawan (persen)	75	75	75	75	75
IKK.6	Indikator Kegiatan: Persentase pengendalian pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan (persen)	60	60	60	60	60
IKK.7	Indikator Kegiatan: Nilai pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan samudera belawan (nilai)	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10
SK.4	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan					
IKK.8	Indikator Kegiatan: Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	724	724	724	724	724
IKK.9	Indikator Kegiatan: Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (persen)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Sasaran Program: Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan						
IK.3	Indikator Kinerja: Proporsi Tangkapan Jenis Ikan yang berada pada batas biologis yang aman (%)	≤80	≤80	≤80	≤80	≤80
SK.5	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang optimal dan bertanggung jawab					
	Indikator Kegiatan: -	-	-	-	-	-
Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel DJPT						
IK.4	Indikator Kinerja: Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86,0	86,5	87,0	87,5	88,0
SK.6	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan					
IKK.10	Indikator Kegiatan: Nilai Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50
IKK.11	Indikator Kegiatan: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)	85	85	85	85	85
IKK.12	Indikator Kegiatan: Nilai PM SAKIP (nilai)	88	88	88	88	88
IKK.13	Indikator Kegiatan: Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (indeks)	87	87	87	87	87
IKK.14	Indikator Kegiatan: Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)	76	76	76	76	76

SASARAN / INDIKATOR		TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKK.15	Indikator Kegiatan: Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)	81	81	81	81	81
IKK.16	Indikator Kegiatan: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)	92	93	94	95	96
IKK.17	Indikator Kegiatan: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (nilai)	71,50	72,00	72,50	73,00	73,50
IKK.18	Indikator Kegiatan: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Indeks)	88,50	89,00	89,50	90,00	90,50

Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran (Output). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan cascading ke unit bawahan.

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Tim Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan meningkat	1	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (ton)	11.000	11.500	12.500	13.000	13.500
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang berdaya saing	2	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)	84	85	86	87	88

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Tim Kerja Kesyahbandaran

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang berdaya saing	1	Tingkat pelayanan kesyahbandaran PPS Belawan (persen)	100	100	100	100	100
2	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di PPS Belawan	2	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	724	724	724	724	724

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Tim Kerja Pelayanan Usaha

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Rp. Juta)	822,55	825,55	830,55	835,55	840,55
2	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang berdaya saing	2	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)	100	100	100	100	100
3	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang optimal	3	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)	60	60	60	60	60

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Tim Kerja Sarana dan Prasarana

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang optimal	1	Persentase pengendalian pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan (persen)	60	60	60	60	60

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Tim Kerja Dukungan Manajerial

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan	1	Nilai Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50
		2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)	85	85	85	85	85
		3	Nilai PM SAKIP (nilai)	88	88	88	88	88
		4	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (indeks)	87	87	87	87	87
		5	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)	76	76	76	76	76

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
		6 Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)	81	81	81	81	81
		7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)	92	93	94	95	96
		8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (nilai)	71,50	72,00	72,50	73,00	73,50
		9 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Indeks)	88,50	89,00	89,50	90,00	90,50

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan perikanan tangkap, serta mencapai target sasaran utama yang telah ditetapkan, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan bersumber dari pemerintah pusat (APBN) melalui Ditjen Perikanan Tangkap difokuskan untuk pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap, penguatan regulasi, penataan perizinan, pemberdayaan dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang terkait dengan usaha perikanan tangkap. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan. Secara terinci kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN menurut program dan kegiatan sebagaimana pada Lampiran 2.

BAB 5 | PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tahun 2025-2029 merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Ditjen Perikanan Tangkap, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh jajaran Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan serta berbagai sektor terkait lainnya, masyarakat juga termasuk seluruh stakeholders perikanan tangkap. Kerja keras dari seluruh jajaran Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Kerangka Regulasi

Matriks Kerangka Regulasi Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2025-2029

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
1.	Revisi PP No. 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Menyesuaikan perizinan dengan skema PIT berbasis zona dan kuota	Biro Hukum KKP	Ditjen PT, DJPRL, Sekjen KKP	2025	Harmonisasi dengan UU Cipta Kerja
2.	Revisi PP No. 85/2021 tentang Jenis dan Tarif PNBP di KKP	Menyesuaikan tarif PNBP berbasis pascaproduksi dan asas keadilan	Biro Keuangan KKP	Ditjen PT, DJPB, DJPRL	2025	Mendukung implementasi PIT
3.	Revisi Permen KP No. 1/2023	Penyesuaian tata cara penetapan nilai produksi untuk dasar PNBP pascaproduksi	Ditjen PT	DJPB, Biro Keuangan	2025	Penajaman indikator nilai produksi ikan
4.	Revisi Permen KP No. 2/2023	Penyempurnaan persyaratan tarif dan objek PNBP berdasarkan realisasi produksi	Ditjen PT	DJPB, DJPRL	2025	Sinergi dengan revisi PP 85/2021
5.	Revisi Permen KP No. 28/2023	Penguatan regulasi PIT terutama terkait kuota, distribusi zona, dan pelabuhan pangkalan	Ditjen PT	DJPRL, Biro Hukum	2025	Dasar operasional PIT
6.	Rancangan Permen KP tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan	Menjamin legalitas dan keberlanjutan hasil tangkapan untuk akses pasar	Ditjen PT	DJPRL, BP2MHKP, DJPDS	2026	Mendukung ketertelusuran dan ekspor
7.	Rancangan Permen KP tentang Kesyahbandaran Perikanan	Memperjelas fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	Ditjen PT	Ditjen Hubla, Pemda	2026	Menjamin keselamatan kapal perikanan

No.	Judul Rancangan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, Dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Instansi Terkait	Target Penyelesaian	Keterangan
8.	Reviu Kepmen KP No. 187/2023	Penyesuaian pelabuhan pangkalan sesuai zona PIT dan kesiapan infrastruktur	Ditjen PT	DJPRL, Pemda	2025	Dasar distribusi kuota dan pengawasan
9.	Kepmen KP tentang Kuota Penangkapan Ikan	Menetapkan alokasi kuota per WPP, jenis ikan, dan kelompok pengguna	Ditjen PT	BRIN, BPS, DJPRL	2025	Kunci pengendalian PIT
10.	Kepmen KP tentang Kuota Industri dan Kuota Nelayan Lokal	Menjamin proporsionalitas kuota dan keberpihakan pada nelayan kecil	Ditjen PT	Pemda, Koperasi, BRIN	2025	Komitmen keadilan distribusi kuota
11.	Kepmen KP tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan	Dasar evaluasi kinerja kapal dan penetapan kuota kapal	Ditjen PT	BPS, BRIN	2025	Dukung efisiensi armada
12.	Kepdirjen PT tentang Verifikasi Data Kuota	Menjamin akurasi pemanfaatan kuota dan kontrol operasional	Ditjen PT	BPS, DJPB	2025	Mendukung pelaporan PIT
13.	Kepdirjen PT tentang Analisis Data Logbook	Memastikan validasi dan analisis hasil tangkapan secara digital	Ditjen PT	Pusdatin, BRIN	2025	Dasar evaluasi kebijakan PIT
14.	Kepmen KP tentang Wilayah Kerja Pelabuhan	Penataan wilayah kerja pelabuhan agar tidak tumpang tindih dan efisien	Ditjen PT	Pemda, DJPRL	2026	Dasar klasifikasi pelabuhan
15.	Kepmen KP tentang Penetapan Kelas Pelabuhan Perikanan	Klasifikasi pelabuhan berdasarkan kapasitas dan fungsi	Ditjen PT	DJPRL, Bappenas	2026	Dukung pembangunan pelabuhan terintegrasi

Lampiran 2: Kerangka Pendanaan

Matriks Kerangka Pendanaan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Tahun 2025-2029

SASARAN / INDIKATOR		TARGET					ANGGARAN (Rp .000)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK.1	Sasaran Kegiatan: Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan										
IKK.1	Indikator Kegiatan: Penerimaan PNPB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Rp. Juta)	822,55	825,55	830,55	835,55	840,55	195.207	186.119	180.000	180.000	180.000
SK.2	Sasaran Kegiatan: Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan meningkat										
IKK.2	Indikator Kegiatan: Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Ton)	11.000	11.500	12.500	13.000	13.500	97.125	75.408	75.000	75.000	75.000
SK.3	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang optimal dan bertanggung jawab										
IKK.3	Indikator Kegiatan: Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)	100	100	100	100	100	45.566	22.934	20.000	20.000	20.000
IKK.4	Indikator Kegiatan: Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)	84	85	86	87	88	103.492	202.044	200.000	200.000	200.000
IKK.5	Indikator Kegiatan: Tingkat pelayanan kesyahbandaran pelabuhan perikanan samudera belawan (persen)	75	75	75	75	75	64.613	216.408	200.000	200.000	200.000
IKK.6	Indikator Kegiatan: Persentase pengendalian pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan (persen)	60	60	60	60	60	50.000	0	50.000	50.000	50.000

SASARAN / INDIKATOR		TARGET					ANGGARAN (Rp .000)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK.7	Indikator Kegiatan: Nilai pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan samudera belawan (nilai)	30,10	30,10	30,10	30,10	30,10	200.000	0	200.000	200.000	200.000
SK.4	Sasaran Kegiatan: Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan										
IKK.8	Indikator Kegiatan: Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	724	724	724	724	724	10.982	0	10.000	10.000	10.000
IKK.9	Indikator Kegiatan: Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (persen)	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	22.097	22.097	22.097	22.097	22.097
IKK.10	Indikator Kegiatan: Nilai Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)	45,50	45,50	45,50	45,50	45,50	19.000	0	20.000	20.000	20.000
IKK.11	Indikator Kegiatan: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)	85	85	85	85	85	150.500	0	150.000	150.000	150.000
IKK.12	Indikator Kegiatan: Nilai PM SAKIP (nilai)	88	88	88	88	88	43.000	0	40.000	40.000	40.000
IKK.13	Indikator Kegiatan: Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (indeks)	87	87	87	87	87	40.000	0	40.000	40.000	40.000
IKK.14	Indikator Kegiatan: Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)	76	76	76	76	76	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
IKK.15	Indikator Kegiatan: Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (persen)	81	81	81	81	81	74.420	15.000	15.000	15.000	15.000

SASARAN / INDIKATOR		TARGET					ANGGARAN (Rp .000)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
IKK.16	Indikator Kegiatan: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (nilai)	92	93	94	95	96	14.718.802	15.336.453	15.336.453	15.336.453	15.336.453
IKK.17	Indikator Kegiatan: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (nilai)	71,50	72,00	72,50	73,00	73,50	81.000	0	80.000	80.000	80.000
IKK.18	Indikator Kegiatan: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (Indeks)	88,50	89,00	89,50	90,00	90,50	18.000	0	18.000	18.000	18.000
TOTAL							16.063.804	16.206.463	16.786.550	16.786.550	16.786.550